

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Atau Kewenangan Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan berasal dari akar kata adil dan juga merupakan terjemahan dari istilah bahasa arab yaitu “*qadha*” yang bermakna memutuskan, melaksanakan, ataupun menyelesaikan.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah peradilan yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan pengadilan yang dimaksudkan ialah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.²⁰ Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lembaga Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia. Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Dan dalam hal ini, maka Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di jelaskan bahwa, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

¹⁹ Ahmad Warsono Munawwir. *Op.cit.* Hal. 1215.

²⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²¹ Roihan A. Rasyid. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.²² Maka sejatinya Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan ini sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dengan beraneka ragam nama atau sebutan istilahnya.²³ Dan pada zaman penjajahan Jepang tidak banyak pula mengalami perubahan, tetapi pada tahun 1957 yakni setelah Indonesia merdeka, ada lagi suatu Badan Peradilan Agama yang dibentuk baru dengan sebutan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah Provinsi.

2. Pengertian Kewenangan Peradilan Agama

Kata “*kekuasaan*” yang sering disebut juga dengan “*kompetensi*” yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*competentie*”, yang kadang kala juga diterjemahkan sebagai “*kewenangan*” dan kadang pula sebagai “*kekuasaan*” untuk memutuskan atau melegalkan sesuatu.²⁴ Kekuasaan atau kewenangan peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara yang merupakan ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh undang-undang terhadap lingkungan peradilan agama

²² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²³ Berikut beberapa nama atau istilah dalam penyebutan Pengadilan Agama pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu diantaranya: Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara’, Priesterrad, Pengadilan Paderi, Godsdients Beamte, Mohammedansche Godsdients Beamte, Kerapatan Qadli, Hof voor Islamietische Zaken, Kerapatan Qadli Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya. Lihat: Roihan A. Rasyid. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 17.

²⁴ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 516.

yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53.²⁵

Maka dalam hal kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama ini telah termaktub dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang kemudian wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif (*relative competentie*) dan wewenang absolut (*absolute competentie*). Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan wewenang absolut Peradilan Agama ini berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu:²⁶

1. Fungsi kewenangan dalam mengadili,
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan,
3. Kewenangan lain yang diatur atau berdasarkan undang-undang,
4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif,
5. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.

²⁵ M. Yahya Harahap. 1993 (I). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini. Hal. 133.

²⁶ *Ibid.*

3. Jenis Kewenangan Peradilan Agama

a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Yang dimaksud dengan kompetensi relatif (*relative competentie*) Peradilan Agama adalah kewenangan ataupun kekuasaan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah ditentukan bahwasanya Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum adalah Hukum Acara yang berlaku pula pada lingkungan Peradilan Agama.²⁷

Oleh sebab itu maka, landasan hukum untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama ini merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.²⁸ Dan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (5) R.Bg. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat, dan asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitor forum rei*".²⁹ Namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 Ayat (2) dan Ayat (4), diantaranya:³⁰

²⁷ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁸ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 120.

²⁹ *Ibid.* Hal. 124.

³⁰ *Ibid.* Hal. 125.

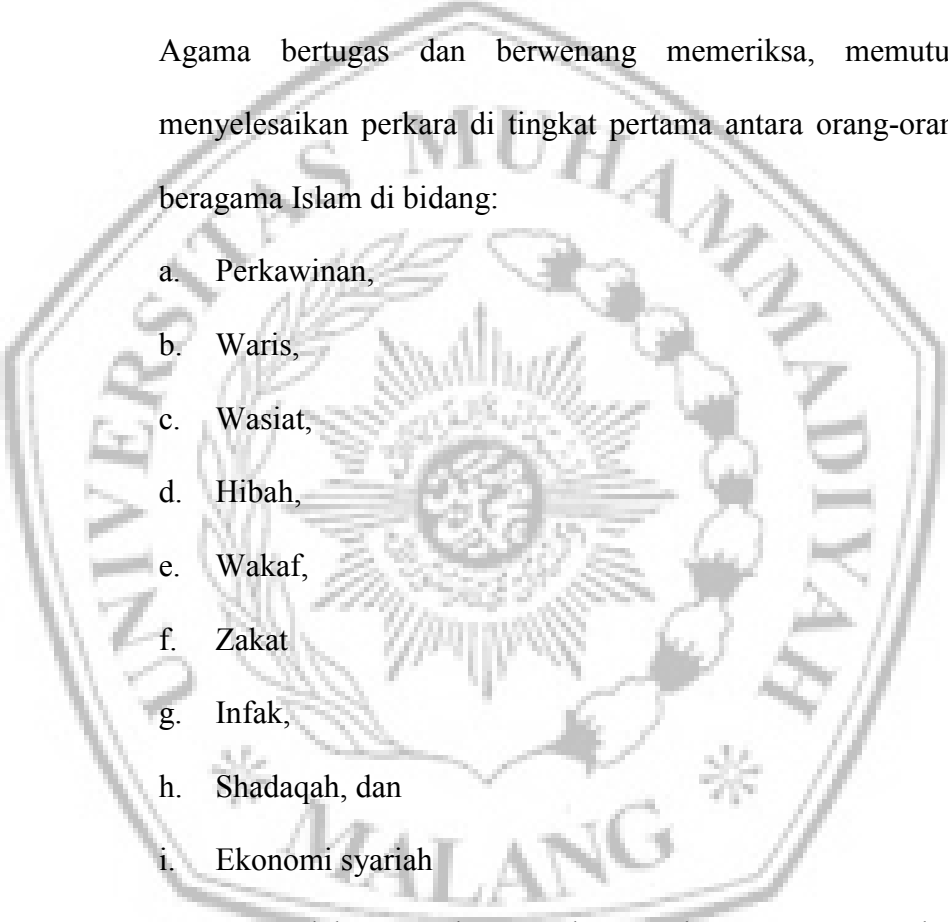
1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,
2. Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat,
3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak,
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan ataupun kewenangan peradilan agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama saja. Dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam merupakan kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat

pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 
- a. Perkawinan,
 - b. Waris,
 - c. Wasiat,
 - d. Hibah,
 - e. Wakaf,
 - f. Zakat
 - g. Infak,
 - h. Shadaqah, dan
 - i. Ekonomi syariah

Dan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan

³¹ M. Yahya Harahap. (I). *Op.cit.* Hal. 134.

objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.³²

Dengan perkataan lain, dalam bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, Prof. Busthanul Arifin berpendapat, beliau menyatakan bahwasanya peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti halnya yang terdapat di beberapa negara lain. Peradilan agama sebagai suatu peradilan keluarga yang secara khusus menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, maka tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.³³

Untuk lebih mendalami lagi perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, maka tiap-tiap perkaranya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikut:

³² Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³³ Retnowulan Sutantio. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Gema insani Press. Hal. 11.

1) Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara Dalam Bidang Perkawinan

Mengenai perkara dalam bidang perkawinan ini adalah segala sesuatu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun perkara-perkara perkawinan yang dimaksud adalah:³⁴

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;

³⁴ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op.cit.* Hal. 129-130.

11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

1. Penetapan Wali Adhal;
2. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2) Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Dalam Bidang Kewarisan, Wasiat, dan Hibah

Menurut Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di jelaskan bahwa kewenangan peradilan agama di bidang kewarisan yang disebut dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b adalah mengenai:³⁵

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan harta peninggalan
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan
- e. Menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
- f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang belum cakap hukum

³⁵ *Ibid.* Hal. 132.

Dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Ayat (1) jo. penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf b, jo. penjelasan umum angka 2 alinea tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal ini terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, maka kewenangan untuk mengadilinya tunduk pada lingkungan peradilan agama, dan bukan pada lingkungan peradilan umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam.³⁶

3) Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Dalam Bidang Wakaf, Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan pengertian tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf ini

³⁶ M. Yahya Harahap (I), *Op.cit.* Hal. 147-148.

sangat penting ditinjau dari sudut pelebagaan keagamaan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 merupakan peraturan perwakafan dalam ajaran Islam yang telah menjadi hukum positif dan pengaturannya memiliki cakupan yang lengkap. Namun demikian, permasalahan wakaf juga semakin kompleks, seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. oleh karena itu, jika ada perselisihan tentang perwakafan tanah milik, maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada pengadilan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan sedekah adalah memberikan uang, benda atau barang, baik berupa benda yang bergerak ataupun benda tetap, yang segera habis apabila dipakai atau tidak, kepada orang lain atau badan hukum, tanpa imbalan dan tanpa syarat, melainkan semata-mata agar mendapatkan ridha dari Allah SWT. Para Fuqaha berbeda pendapat tentang definisi sedekah, ada yang mengartikannya hibah, ada yang mengartikannya wakaf, dan ada pula yang mengartikannya zakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku tahun 2001, maka dengan demikian pengadilan agama berwenang

³⁷ Sulaikin Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 101.

untuk menyelesaikan perkara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³⁸

4) Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Dalam Bidang Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah atau hukum Islam. Kegiatan ekonomi syari'ah meliputi beberapa hal, yaitu:³⁹

1. Bank syari'ah
2. Asuransi syari'ah
3. Reasuransi syari'ah
4. Reksa Dana syari'ah
5. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
6. Sekuritas syari'ah
7. Pembiayaan syari'ah
8. Pegadaian syari'ah
9. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
10. Lembaga keuangan mikro syari'ah dan lain-lain.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hal yang menarik adalah perluasan pengertian terhadap orang-orang yang meliputi juga lembaga ekonomi berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Hal ini

³⁸ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op.cit.* Hal. 138.

³⁹ *Ibid.* Hal. 140-141.

disebabkan lembaga keuangan sebagai badan hukum dimasukkan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Hal-hal mengenai ekonomi syari'ah tersebut merupakan wewenang atau kompetensi absolut pengadilan agama, baik perkara-perkara dalam perbankan Islam maupun asuransi Islam. Dengan demikian, kewenangan dan kekuasaan peradilan agama semakin luas dengan adanya ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia, yaitu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa mengenai ekonomi Islam atau asuransi Islam di Indonesia.

Sesuai dengan tuntutan reformasi dalam bidang hukum, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian menegaskan bahwa adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan

agama diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

5) Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Dalam Bidang Yang Lain

Dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa peradilan agama juga diberikan tugas dan kewenangan lain, yaitu dalam hal memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Akan tetapi, pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam tersebut tidak dibenarkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan.⁴⁰

Dalam ketentuan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama juga berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah, yang regulasinya terdapat dalam Pasal 52 A. Dalam penjelasannya, Pasal 52 A menyatakan bahwa pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal. Setiap menyaksikan bulan Ramadhan dan bulan Syawal tahun Hijriah, Menteri Agama

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 141-143.

mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Selain itu, pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Selanjutnya, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara secara damai, yang dapat dimungkinkan secara luas mengenai persoalan perkara (sengketa) di bidang kesusilaan Islam dan kemasyarakatan lainnya.

Di Indonesia sejak tahun 1993 telah dibentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang namanya diganti menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Lembaga ini bertugas menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan yang bekerja layaknya sebagai wasit (arbitrase) yaitu melalui mediasi (musyawarah), dan putusannya bersifat final dan mengikat/binding.

Demikianlah, secara singkat kewenangan peradilan agama, baik yang menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut pengadilan agama di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

B. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Sidang di Luar Gedung Pengadilan salah satu bentuknya adalah dengan mengadakan pelayanan sidang keliling sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.⁴¹ Adapun yang dimaksud dengan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.⁴²

Dalam pelaksanaannya, sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya yang ditetapkan sebagai tempat sidang.⁴³ Dan dalam hal tersedianya fasilitas tempat sidang tetap atau

⁴¹ Lihat Pasal 1 Angka 5 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Lihat Pasal 18 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

tempat sidang keliling permanen yang dimiliki pengadilan, sidang di luar gedung pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut.⁴⁴

Dalam menetapkan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan, yaitu ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.⁴⁵ Para petugas yang bertugas dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan mengupayakan dekorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar gedung Pengadilan.⁴⁶ Adapun kemudian ruang dan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan ini harus juga memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.⁴⁷

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, yaitu khususnya untuk perkara-perkara yang mana kemudian pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.⁴⁸ Jadi, sidang keliling itu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang menangani perkara khusus yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.

Aturan lebih lanjut mengenai sidang keliling untuk Penerbitan Akta Perkawinan dapat kita lihat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

⁴⁴ Lihat Pasal 18 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁴⁵ Lihat Pasal 18 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁴⁶ Lihat Pasal 18 Ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁴⁷ Lihat Pasal 18 Ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁴⁸ Lihat Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Kemudian yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.⁴⁹

Tujuan pelayanan terpadu sidang keliling adalah:⁵⁰

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum,
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan

⁴⁹ Lihat Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

⁵⁰ Lihat Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan KUA Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.⁵¹

Yang meliputi dalam pelayanan terpadu sidang keliling diantaranya:⁵²

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran,
2. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan
3. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Penerima manfaat dari pelayanan terpadu sidang keliling meliputi:⁵³

1. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan,
2. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis,

⁵¹ Lihat Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

⁵² Lihat Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

⁵³ Lihat Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

3. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, dan/atau
4. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sidang keliling ini merupakan sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang mana peruntukannya yaitu bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Itsbat nikah merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan pada pelayanan terpadu sidang keliling, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Sidang keliling ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama/KUA Kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Setelah perkara diputus maka salinan putusan bisa diambil di tempat sidang keliling tersebut dilaksanakan.

C. Itsbat Nikah atau Penetapan Nikah

1. Pernikahan Yang Sah

Pada dasarnya praktik perkawinan di negara hukum seperti di Indonesia ini harus mendapatkan pengakuan dari negara dan juga mendapatkan kepastian hukum atas suatu pernikahan yang telah dilangsungkannya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka terwujudnya tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum wanita. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Adapun kemudian yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga dapat diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara ataupun penguasa berdasarkan peraturan hukum, dalam artian penguasa tidak bertindak sewenang-wenang.⁵⁴

Sahnya suatu pernikahan merupakan hal yang sangat penting (*urgent*) karena berhubungan erat dengan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari suatu pernikahan, baik hal-hal yang menyangkut keturunan maupun harta dalam pernikahan tersebut. Bilamana suatu pernikahan dinyatakan sah, maka terhadap harta yang diperoleh selama dalam pernikahan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut maka kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas, serta dinyatakan

⁵⁴ Ahmad Sanusi. 2016. *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*. Banten. Jurnal Ahkam. Vol. XVI, No. 1. Fakultas Syari'ah. IAIN SMHB Serang. Hal. 113.

mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini maka hukum Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga syarat, yaitu:

- a) Terpenuhi rukun-rukun nikah
- b) Terpenuhi syarat-syarat nikah, dan
- c) Tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari'at.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Syeikh Jaad al Haq sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, beliau telah membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori.⁵⁵

- a) Peraturan Syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhabnya, yang merupakan unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam telah secara

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein. 2000. *Analisis Yurisprudensi Tentang Itsbat Nikah (artikel dalam analisis fiqh)*. Mimbar Hukum. Vol. XII, No.50. Hal.117.

sempurna dapat dipenuhi, maka Jaad al Haq akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, dan anak dari hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak sah.

- b) Peraturan yang bersifat tawtsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administrasi ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam itu, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan menurut A. Mukti Arto, suatu pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:⁵⁶

- a) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam,
- b) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada PPN yang berwenang.

Sementara dalam KHI, unsur sahnya pernikahan dan unsur pencatatan nikah diberlakukan secara kumulatif, yaitu sebagaimana

⁵⁶ A. Mukti Arto. 1996. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Pernikahan (artikel)*. Mimbar Hukum No. 26. Hal. 48.

dalam rumusan Pasal 4 dan Pasal 5 KHI. Bahkan dalam Pasal 7 Ayat (1) KHI menegaskan bahwa, perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dengan demikian, KHI telah menegaskan bahwasanya sahnya pernikahan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pernikahan tersebut harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencatatan Pernikahan

Dalam syari'at Islam, masalah muamalah pada situasi tertentu diperintahkan untuk dicatat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ...⁵⁷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya . . .” (QS. Al-Baqarah: 282)

⁵⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Dalam Ayat ini mengisyaratkan adanya suatu kewajiban pencatatan dalam setiap transaksi atau kejadian. Bila ayat ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan suatu pernikahan, maka sesungguhnya pernikahan itu juga harus dicatatkan agar mendapatkan kepastian hukum tentang adanya suatu perkawinan, karena ayat ini pun sebenarnya telah mensyari'atkan adanya suatu bukti otentik dalam setiap transaksi atau perjanjian.

Dengan mengadopsi surat Al-Baqarah Ayat 282 ini, maka dibuatlah suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana kemudian undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang mencerminkan eksistensi dari hukum Islam, maka hal ini merupakan era yang baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian isi pasal tersebut dirumuskan oleh Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa, "Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk". Adapun tatacara

pencatatannya dilakukan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

Pasal 11 Ayat (1 dan 3) Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa, “Sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, maka kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan, dan pernikahan itu telah tercatat secara resmi.” Sehingga dengan demikian, pernikahan tersebut telah dinyatakan sebagai pernikahan yang harus dilindungi oleh hukum serta telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Adapun regulasi lain yang mengatur tentang pencatatan pernikahan adalah:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
- b. Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan Pasal 7 Ayat (1).

Pencatatan pernikahan pada dasarnya bertujuan agar terwujudnya suatu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Maka dengan demikian pencatatan pernikahan merupakan syarat formil sahnya perkawinan dan diakui secara yuridis formil. Dan dalam kaidah hukum Islam, pencatatan pernikahan jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip:

درء المفاسد اولی من جلب المصالح⁵⁸

⁵⁸ MuhlishUsman. 1997. *Kaidah-kaidah Ushuliyahdan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal.137.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصالح⁵⁹

Artinya: “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

3. Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu “*itsbat*” dan “*nikah*”. Itsbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengekatan.⁶⁰ Sedangkan nikah berarti kawin.⁶¹ Jadi yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah penetapan atau pengukuhan nikah, yakni merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang sudah dilakukan dikarenakan adanya suatu keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik yaitu dengan akta nikah. Sehingga dalam hal ini yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dikukuhkan atau disahkan, dan dengan penetapan tersebut untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah bagi yang bersangkutan. Menurut Pasal 7 KHI menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 150

⁶⁰ Ahmad Warsono Munawwir. *Op.cit.* Hal. 145

⁶¹ *Ibid.* Hal. 1461

- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat di ajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - 2) Hilangnya Akta Nikah.
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶²

Itsbat nikah atau penetapan nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama yang kemudian di kelompokkan dalam perkara voluntair dimana hanya ada satu pihak saja yang berkepentingan, yaitu pemohon dan produk hukumnya berupa suatu penetapan.

⁶² Ahmad Ainani. 2010. *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Martapura. Jurnal Darussalam. Vol. 10, No. 2. STAI Darussalam. Hal. 122-123.

Dengan adanya itsbat nikah ini yang dimaksudkan agar dalam suatu pernikahan tidak terjadi kekurangan serta penyimpangan terhadap rukun dan syarat pernikahan baik itu menurut hukum syari'at ataupun perundang-undangan, maka hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Rafiq yang mengemukakan manfaat dari itsbat nikah yang terbagi dua macam, diantaranya:

- a. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan ataupun penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.
- b. Manfaat represif, yaitu pencatatan nikah di maksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang.⁶³

a. Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam

Pandangan ulama klasik terkait dengan masalah itsbat nikah menyatakan bahwasanya tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit pencatatan nikah memang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali madharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan

⁶³ *Ibid.* Hal. 123

nikah. Islam pun menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus di hindari sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kemudian sebagai upaya untuk menguraikan kesalahan pahaman tentang sahnya suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini Syekhul Azhar Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan *الزواج العرفي* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian beliau mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara' dan peraturan yang bersifat al-tawtsiqiy.⁶⁴

Wahbah Zuhaili dalam karyanya, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar'i dan syarat tawtsiqiy. Syarat syar'i adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tawtsiqiy merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya

⁶⁴ Asasriwarni, *Kepastian Hukum 'Itsbat Nikah terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan*. <http://www.nu.or.id>. Diakses tanggal 25 September 2017.

suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat tawtsiqiy tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu.⁶⁵

Kemudian, dengan adanya perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan yang mendasarinya, yaitu:⁶⁶

1) Qiyas

- a) Dalam masalah pencatatan nikah ini maka diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah dalam QS.

Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ . . . ۝ ٦٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya

⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr. Hal. 36.

⁶⁶ Asasriwarni. *Op.cit.*

⁶⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

sebagaimana Allah mengajarkannya . . .” (QS. Al-Baqarah: 282)

- b) Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
- c) Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁶⁸

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’: 21)

2) Masalah Mursalah.

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari’at dan juga tidak dilarang oleh syari’at, namun semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Maka dalam hal ini,

⁶⁸ Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 21.

itsbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Itsbat Nikah Dalam Hukum Positif

Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah. Namun realitanya masih terdapat pasangan suami istri yang telah menikah akan tetapi tidak mempunyai akta nikah. Kemungkinan yang menjadi penyebab tidak adanya akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) kelalaian yang disebabkan ketidaktahuan baik dari pihak suami istri ataupun pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah,
- 2) besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut,
- 3) adanya kelalaian dari petugas Pegawai Pencatat Nikah atau yang mewakili seperti dalam hal memeriksa surat-surat ataupun persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada telah hilang,
- 4) pernikahan tersebut dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 5) dalam hal berpoligami tidak terpenuhinya syarat-syarat terutama tidak adanya persetujuan dari istri yang sebelumnya.

Masalah itsbat nikah ini di pertegas lagi dalam KHI Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Maka dengan adanya ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan.

Kemudian dalam KHI perkara itsbat nikah diperjelas pada Pasal 7 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:⁶⁹

- 1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian;
- 2) hilangnya akta nikah;
- 3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum itsbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, tetapi juga

⁶⁹ Asasriwarni. *Loc.cit.*

menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat 2 tersebut dikatakan bahwa “salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”.

c. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Anak

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara’, tentunya itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Maka dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28 B Ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
- 3) Pasal 2 Ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- 4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 5) Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, maka alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua menginginkan memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil nantinya hanya akan mencantumkan nama ibunya saja yang dengan demikian berarti sama dengan Akta

Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan aturan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49, yaitu antara lain berupa status hubungan hukum, pendidikan dan perawatan, pemeliharaan dan tindakan hukum, dan pemeliharaan hak dan harta bendanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 98, 99, 104, 105, dan 106. Dan upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Harta Perkawinan

Sejalan dengan kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap stutus harta perkawinan. Dengan adanya itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada Pasal 35

disebutkan bahwa, “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Dalam Pasal 36 dirumuskan bahwa, “(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya”. Apabila ada pasangan suami istri yang perkawinannya putus akibat perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama (*gono gini*) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

4. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Itsbat Nikah

Pengadilan Agama memang merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam dengan lingkup kewenangan (kompetensi) yang khusus pula, baik mengenai perkara yang ditanganinya maupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).⁷⁰ Khusus

⁷⁰ Setelah undang-undang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah menjadi meliputi

kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Kemudian dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontensius) dan ada pula yang berupa permohonan (voluntair). Salah satu perkara permohonan (voluntair) yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah itsbat nikah.

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷¹ Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 Ayat (2) dan (3).⁷²

bidang : (a) perkawinan, (b). Waris, (c). Wasiat, (d). Hibah, (e). Wakaf, (f). Zakat, (g). Infaq, (h). Shadaqah, dan (i) ekonomi syari'ah. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*.

⁷¹ Dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) yang berbunyi: "Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", serta dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah".

⁷² Dalam Ayat (2) disebutkan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya". Pada Ayat (3) disebutkan : Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya

Mengenai perkara itsbat nikah ini ada Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 39 Ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat.⁷³ Kemudian atas dasar pengesahan atau penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah KUA kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula pegawai pencatat nikah akan mengeluarkan buku nikah atau kutipan akta nikah.

keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

⁷³ Lihat Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun kenyataan yang ada di masyarakat masih banyaknya ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah KUA dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah, yang kemudian dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

5. Landasan Yuridis Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Itsbat Nikah

Ketentuan pasal undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) serta Ayat (3) huruf d KHI. Sedangkan kedua regulasi atau ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama yaitu hanya terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan pembatasan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal dalam melakukan itsbat nikah. Sedangkan hasrat atau semangat masyarakat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terus meningkat. Hal tersebut seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah diharuskan melampirkan foto kopi akta kelahiran,

dan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta lahir seorang anak adalah adanya bukti buku nikah dari orang tua anak yang bersangkutan.

Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi hal tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.⁷⁴ Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁴ Pasal tersebut berbunyi, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kebijakan tersebut diambil karena ternyata itsbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama itu dipertimbangkan karena mashlahah bagi umat Islam. Dari kenyataan tersebut itu pula, Dirjen Badilag kemudian menjadikannya sebagai salah satu *justice for all*, khususnya bagi masyarakat Muslim yang miskin dan mereka yang termarginalkan dalam bentuk sidang keliling di dalam maupun di luar negeri.

D. Asas Peradilan

1. Pengertian Asas

Pada dasarnya inti dari suatu hukum terletak pada asas-asasnya yang mana kemudian diformulasikan menjadi suatu perangkat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pada saat beracara di Pengadilan Agama maka asas-asas sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama harus diperhatikan. Dan dalam hal ini, maka asas yang berlaku pada peradilan agama hampir sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum.⁷⁵

Adapun yang dimaksud asas adalah suatu pijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaharuan dalam peradilan agama. Asas-asas yang terdapat dalam peradilan agama memiliki fundamental yang kuat dalam berjalannya proses peradilan agama. Dikarenakan dengan adanya asas-asas peradilan agama tersebut,

⁷⁵ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op.cit.* Hal. 145.

maka suatu proses acara peradilan agama dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana pedoman dari asas-asas tersebut.⁷⁶

2. Macam-macam Asas Peradilan Agama

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi Peradilan Agama merupakan salah satu Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.⁷⁷

Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu yakni perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf dan sedekah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Selainnya baik itu Kristen Protestan, Hindu, Budha dan lain-lain, maka penyelesaian perselisihan tentang hal tersebut tidak dapat dilayani oleh pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, karena tempat penyelesaian

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 37.

perselisihannya adalah wewenang Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.⁷⁸

Asas-asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
- b. Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah;
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

b. Asas Kebebasan/Kemerdekaan

Salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁹ Menurut M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Taufik Hamami kebebasan disini maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur dalam penanganan suatu perkara oleh Pengadilan/Majelis hakim, ikut campur, dapat berubah pemaksaan,

⁷⁸ Taufiq Hamami. 2003. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Alumni. Hal. 97.

⁷⁹ *Ibid*. Hal. 39.

directiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudisial*, ancaman dan lain sebagainya.

Namun kebebasannya tersebut bukan kebebasan tanpa batas yang kemudian seperti membabi buta, akan tetapi kebebasan dalam hal menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menangani suatu kasus yang diperiksanya, serta menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan dan kebebasan mencari dan menemukan hukum, kebebasan untuk memakai/tidak memakai yurisprudensi dan lain-lain.⁸⁰

Dalam usaha memperkuat prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum maka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang mengenai teknis yudisial, organisasi, administrasi maupun finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

⁸⁰ *Ibid.* Hal. 101.

c. Asas Upaya Mendamaikan

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan, kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak.

Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, arti perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, yaitu keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan, pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dapat diselamatkan, kerukunan antar kedua belah pihak dapat berlanjut, harta gono gini dapat lestari dalam menopang kehidupan rumah tangga, suami istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan hidup sehari-hari.

Memperhatikan itu semua, maka dalam upaya mendamaikan perkara sengketa perceraian bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan hukum kepada hakim. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus secara optimal.⁸¹

⁸¹ *Ibid.* Hal. 41.

Dalam hal usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut, kekuatannya sama dengan putusan, yaitu mengikat dan dapat dieksekusi. Akan tetapi dalam hal perkara perceraian, apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka tidak dibuat akta perdamaianya, melainkan perkaranya dicabut oleh pihak penggugat/pemohon, dan atas pencabutan tersebut hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang pernyataan pencabutan dan penggugat atau pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara.⁸²

d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pada prinsipnya semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang menyatakan *lex specialis derogat lex generalis* yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum.⁸³

Menurut M. Yahya Harahap seperti dikutip Taufiq Hamami tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pemeriksaan, seperti bersikap berat

⁸² *Ibid.* Hal. 101.

⁸³ Mardani. *Op.cit.* Hal. 42.

sebelah hakim dengan bertindak sewenang-wenang. Maka untuk itulah masyarakat oleh undang-undang diperkenankan untuk menghadiri jalannya persidangan dan diperbolehkannya masyarakat hadir untuk mendengarkan pemeriksaan di persidangan untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan peradilan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁸⁴

e. Asas Legalitas

Asas legalitas di dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal di atas mengandung pengertian *rule of the law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum dan harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum, hukum berada di atas segala-galanya.

Hakim dan siapapun semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum. Dalam rumusan pasal tersebut juga dapat dipahami, bahwa asas legalitas mengandung unsur hak asasi manusia (HAM), yang

⁸⁴ Taufiq Hamami. *Op.cit.* Hal. 103.

berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan dan perlindungan hukum.⁸⁵

Asas legalitas artinya pengadilan mengadili menurut hukum, dan ini berarti Hakim sebagai organ pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertindak diluar hukum, dan semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas peradilan harus menurut dengan hukum.⁸⁶

f. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan peradilan dilakukan secara sederhana dan cepat adalah suatu pemeriksaan yang tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Bahkan, kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Akan tetapi cukup kiranya proses pemeriksaannya dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan. Sedangkan biaya ringan maksudnya adalah biaya yang sudah jelas dan pasti peruntukannya tanpa ada biaya tambahan, biaya siluman atau biaya pelicin sehingga keseluruhan biaya untuk berperkara tidak membengkak. Dan pada akhirnya tidak akan dipikul oleh rakyat, meskipun demikian hal semacam ini tentu tidak boleh mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁸⁷

⁸⁵ Mardani. *Op.cit.* Hal. 43.

⁸⁶ Taufiq Hamami. *Op.cit.* Hal. 102.

⁸⁷ *Ibid.*

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai betahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses sidang yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan.

Jadi yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini ialah:

- 1) Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja di lambat-lambatkan;
- 2) Tidak boleh mengurangi kecepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan, kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.⁸⁸

g. Asas *Equality*

Asas *equality* berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, suku, agama, jenis kelamin dan budaya. Asas *equality* ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁸⁸ Mardani. *Op.cit.* Hal. 44.

yang berbunyi peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Implementasi asas *equality* dalam sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Equal before the law*, yaitu persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan.
- 2) *Equal protection on the law*, yaitu hak dan perlindungan yang sama oleh hukum.
- 3) *Equal justice under the law* yaitu mendapat hak perlakuan yang sama oleh hukum.⁸⁹

h. Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Asas ini diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin jalannya persidangan dan mencari serta menentukan hukum penyelesaian suatu sengketa/perkara yang diajukan kepadanya.

Maka sesungguhnya dalam hal ini hakim berfungsi untuk memberikan solusi terbaik sekaligus memberikan bantuan kepada

⁸⁹ *Ibid.*

para pihak yang berperkara secara objektif dan menunjang rasa keadilan serta berusaha dengan sekeras-kerasnya dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹⁰

3. Asas Peradilan Agama Mengenai Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memaparkan kembali suatu konsep dasar yang sangat penting yang mana merupakan suatu pondasi dan harus selalu di ingat oleh para penegak hukum dalam menjalankan profesinya. Hal ini dikarenakan ketika kita merujuk pada makna ataupun definisi dari asas tersebut, maka kita akan mendapatkan maksud dari asas tersebut dan jika asas tersebut benar-benar dilaksanakan secara komprehensif sebagaimana mestinya, maka kemungkinan besar peradilan di Indonesia akan minim permasalahan.

Dalam asas-asas Peradilan Agama terdapat salah satu asas yaitu asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Asas ini diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Adapun makna yang lebih luas tercantum dalam penjelasan umum dan penjelasan pada Pasal 4 Ayat (2),

⁹⁰ *Ibid.* Hal. 45.

sedangkan makna dan tujuan dari adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah berlaku sepenuhnya dalam undang-undang tersebut, yang mana hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 5 alinea kelima yang menyebutkan: “. . . setiap keputusan yang dimulai dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan . . .”.⁹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberikan penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun hal ini telah dijelaskan dalam penjelasan umum angka 5 alinea kelima pada Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa, prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini ditegaskan dan dicantumkan kembali.⁹² Dan selanjutnya disebutkan pula maksud dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁹¹ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op.cit.* Hal. 157-158.

⁹² *Ibid.* Hal. 158.

Penjelasan tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2), yang berbunyi, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terikul oleh rakyat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cepat” diartikan kencang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Maka berdasarkan pengertian “cepat” tersebut, kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan “segera”.⁹³

Sebenarnya terkait dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini bukan merupakan pembahasan yang baru lagi, karena sejak adanya HIR sudah tersirat asas ini dengan kata-kata yang lebih konkret daripada yang digunakan dalam KUHAP. Untuk menunjukkan suatu sistem peradilan yang cepat, maka banyak ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP yang memakai istilah “segera”. Misalnya dalam HIR pada Pasal 71 dikatakan bahwa “jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa.” Maka

⁹³ Wiratih Dwi Pangestu. 2008. *Pengaturan Asas Contante Justitie (Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Surakarta. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 14.

tentu berdasarkan istilah “satu kali dua puluh empat jam” lebih pasti maknanya daripada istilah “segera”. Sehingga dengan demikian, ketentuan yang sangat bagus ini perlu diwujudkan dalam praktik peradilan oleh penegak hukum.⁹⁴

Asas *Contante Justitie* atau disebut juga dengan *Speedy Trial*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang cukup banyak diwujudkan dengan istilah “segera” dalam KUHAP. Kemudian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini sebagaimana yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun yang dimaksud dengan peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.⁹⁵

Kemudian yang dimaksudkan dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini adalah untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari para aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan, maupun ketika persidangan di pengadilan. Untuk itu sekiranya diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi serta tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang

⁹⁴ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 12.

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 13.

menggiurkan. Jikalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka akan terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.⁹⁶

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan perkara yang sifatnya sederhana adalah suatu pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, maka hal yang seperti inilah yang kemudian diartikan dengan “sifat perkara sederhana”.⁹⁷

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa asas dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi. Maka dari itu, dalam melaksanakan fungsi pelayanan sebagai aparat penegak hukum, seorang hakim harus benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi hakim yang bertugas di pengadilan agama, maka ia harus lebih mulia dan lebih luhur penampilannya dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan predikat pengadilan agama yang kental akan nilai-nilai keislamannya.⁹⁸

Adapun makna dan tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya

⁹⁶ Wiratih Dwi Pangestu. *Op.cit.* Hal. 3.

⁹⁷ M. Yahya Harahap. 2010 (II). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Ed. 2. Cet. 12. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 396.

⁹⁸ M. Yahya Harahap (I). *Op.cit.* Hal. 56.

ringan dalam suatu persidangan dan bukan pula bertujuan menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam waktu yang singkat. Namun sejatinya, tujuan dan cita-cita dari adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini adalah tercapainya suatu pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama dan tentu sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Dan apabila seandainya hakim sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut dianggap tidak bermoral serta tidak profesional dan telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini.⁹⁹

Jadi ada beberapa hal yang dapat dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini, diantaranya:¹⁰⁰

1. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan. Yaitu sebagaimana pemeriksaan dilakukan secara saksama, wajar, rasional, dan objektif dengan cara memberikan kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada tiap-tiap pihak yang bersengketa.
2. Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan.

⁹⁹ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Op.cit.* Hal. 158.

¹⁰⁰ Mardani. *Op.cit.* Hal. 44.

Jadi adapun tujuan dari asas ini tidak lain ialah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun serta sesuai dengan kesederhanaan hukum acara peradilan agama itu sendiri, dan dengan begitu maka hakim tidak mempersulit dengan proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini merupakan dambaan bagi setiap orang yang mencari keadilan. Untuk itu pengadilan agama harus optimal dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini.

